

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Dokdo/Takeshima merupakan sebuah gugusan pulau karang yang terletak di bagian paling timur wilayah Korea Selatan dan berada di bagian barat laut dari wilayah Jepang. Pulau ini memiliki dua nama berbeda, yaitu Korea Selatan dengan sebutan pulau Dokdo (pulau karang) sedangkan Jepang dengan sebutan pulau Takeshima (pulau bambu).¹ Pulau Dokdo/Takeshima terdiri dari dua pulau utama, yaitu Dongdo dan Seodo dan selebihnya merupakan batuan-batuan karang yang mengelilinginya. Luas dari Pulau Dokdo yaitu 187.453 m yang terdiri dari luas pulau Dongdo 73.297 m dan pulau Seodo 88.674 m. Pulau Dokdo/Takeshima terletak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan, dan 58 mil laut diukur dari pulau Ulleungdo milik Korea Selatan. Sedangkan jika diukur dari Jepang maka pulau Dokdo terletak 138 mil laut dan sekitar 100 mil laut dari pulau Oki milik Jepang.² Dalam penelitian ini, penulis akan memakai nama Dokdo untuk menjelaskan pulau yang disengketakan.

Pulau Dokdo sendiri merupakan wilayah dari Korea Selatan, hal ini mengacu pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah

¹ Steven J. Barber, "Dokdo-Takeshima Island : *A Brief Introduction to Korea's Dokdo [Takeshima] Island*", 2009, <https://www.dokdo-takeshima.com/>, (diakses 15 Juni 2020)

² Steven J. Barber, "Dokdo-Takeshima Island : *A Brief Introduction to Korea's Dokdo [Takeshima] Island*", hal 1

yang tidak ada pemiliknya yang dinamakan Ussankuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla pada tahun 512 SM.³ Namun selama awal tahun 1905, Jepang yang menjajah Korea Selatan menganggap bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah yang tidak ada pemiliknya (*terra nullius*),⁴ dan kemudian mulai menduduki pulau tersebut dan berada dalam Prefektur Shimane. Pada saat itu, pemerintah Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima dimulai pada tanggal 22 Februari 1905 dan setiap tanggal 22 Februari, Jepang merayakan Hari Takeshima (*Takeshima Day*).⁵

Sengketa pulau Dokdo bermula ketika Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia kedua. Saat itu Jepang diminta untuk menyerahkan kembali wilayah jajahannya, termasuk pulau Dokdo. Ketika pendudukan militer Jepang berakhir pada tahun 1950, Korea Selatan secara cepat menegaskan kembali bahwa pulau Dokdo merupakan wilayah mereka, dan mulai membangun infrastruktur – infrastruktur dan menempatkan para penjaga disekitar pulau Dokdo.⁶ Ketika Korea Selatan menyatakan pulau Dokdo sebagai wilayah kedaulatannya, Jepang merasa tidak terima karena ketika dalam proses pengembalian wilayah jajahan, pulau Dokdo tidak dimasukkan oleh Jepang kedalam daftar wilayah jajahan yang harus dikembalikan.⁷

Hal ini mengacu pada perjanjian San Fransisco tahun 1951 yang menyatakan bahwa

³ Hoon Lee, *Dispute over Teritorial Ownership of Dokdo in the Late Joseon Periode*, Korea Observer Journal, hal.389

⁴ Kazuo Hori, *Japan's Incorporation of Takeshima in to Its Territory In 1905*, Korea Observer Journal, Vol. 28, 1997, hal. 477

⁵ Kazuo Hori, hal. 477

⁶ Jon M. Van Dyke, *Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and It's Maritime Boundary*, Ocean Development & International Law, 2007, vol 38

⁷ Yamasaki Daku, "Japan Has Taken Steps Over a Long Time Period in Order to Bring the Takeshima Issue to the International Court of Justice, and Ultimately the International Community Will Judge This Issue", Jung-ang Daily, 14 Agustus 2008

“Jepang mengakui Kemerdekaan Korea Selatan, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan klaim atas Korea Selatan, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet.”⁸

Dalam perjanjian tersebut Jepang menyatakan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan pulau Dokdo dan hanya mengakui kemerdekaan Korea Selatan. Melihat adanya protes yang dilakukan pihak Jepang, Korea Selatan lebih memilih untuk bersikap tenang dan tidak menanggapi protes dari Jepang. Pemerintah Korea Selatan bersikap seperti “tidak ada sengketa teritorial mengenai Dokdo dan Dokdo bukanlah masalah yang harus ditangani melalui negosiasi diplomatik atau penyelesaian yudisial, dan pemerintah menjalankan kedaulatan teritorial Korea yang tak terbantahkan atas Dokdo”.⁹ Dari tahun 1950 hingga 1990-an hanya beberapa protes diplomatik yang dilakukan pihak Jepang terhadap pendudukan Korea Selatan di pulau Dokdo, yaitu terjadi pada tahun 1977, 1983, dan 1993. Protes Diplomatik tertinggi yang dilakukan Jepang kepada Korea Selatan yaitu ketika Jepang membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pulau Dokdo ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu, pertama pada bulan Maret 1962. Kedua, pada bulan September 1964. Ketiga, pada bulan Agustus 2012 Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa pulau Dokdo ditolak oleh Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa proposal pemerintah

⁸ Seokwoo Lee, Jon M. Van Dyke, “*The 1951 San Francisco Peace Treaty and It’s Relevance to the Sovereignty over Dokdo*”, Oxford University Press, 2010

⁹ Krista E. Weigand, “*The South Korean – Japanese Security Relationship and the Dokdo/Takeshima Islets Dispute*”, *The Pacific Review*, 2015, vol 28, no 3, hal 349

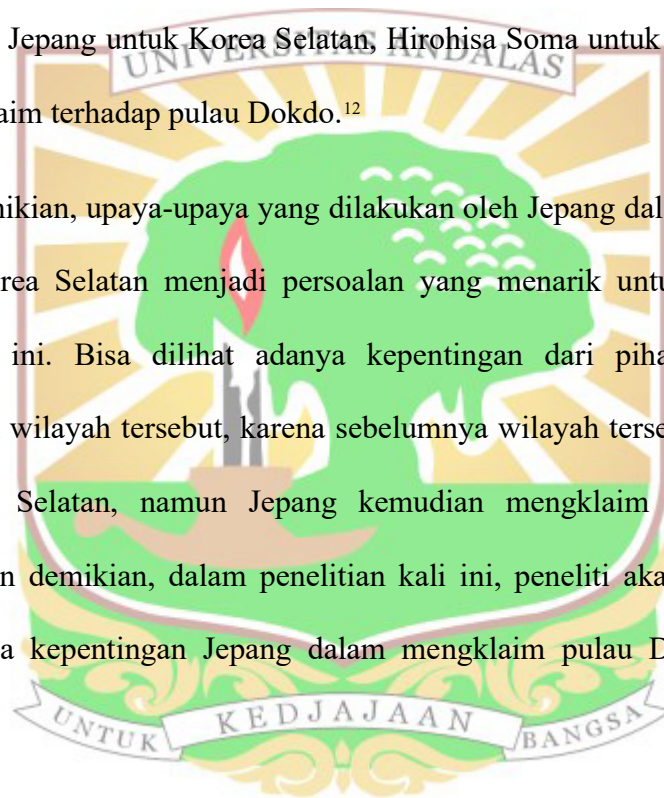
Jepang tidak lain adalah upaya palsu lainnya yang disamarkan dalam bentuk proses peradilan.

Korea Selatan juga beralasan bahwa tidak ada persengketaan yang terjadi di pulau Dokdo karena pulau Dokdo tersebut adalah milik Korea Selatan.¹⁰ Pihak Korea Selatan lebih memilih jalan diplomasi dalam upaya penyelesaian masalah sengketa ini. Pihak Korea Selatan sebenarnya memiliki peluang untuk dapat memenangkan sengketa Pulau Dokdo di Mahkamah Internasional karena hingga saat ini Korea Selatan masih menggunakan Pulau Dokdo untuk beberapa kepentingan. Meskipun demikian, Korea Selatan tidak ingin membawa masalah ini kepada Mahkamah Internasional karena tidak ingin mengambil resiko apabila Mahkamah Internasional menyatakan Pulau Dokdo menjadi milik Jepang. Jika demikian, maka Korea Selatan harus menanggung resiko kehilangan Pulau Dokdo. Dengan demikian Jepang mengalami kendala dalam penyelesaian sengketa pulau Dokdo melalui Mahkamah Internasional, dikarenakan pihak Korea Selatan menolak tiga kali perjanjian yang diajukan oleh Jepang untuk membawa permasalahan sengketa pulau Dokdo ke Mahkamah Internasional yaitu, pada bulan Maret 1962, bulan September 1964, dan bulan Agustus 2012. Sedangkan dalam Mahkamah Internasional penyelesaian sengketa hanya dapat diselesaikan apabila kedua negara yang bersengketa atau berkonflik harus menandatangani perjanjian penyerahan permasalahan sengketa ke Mahkamah Internasional, apabila salah satu pihak menolak maka proses penyelesaian sengketa di dalam Mahkamah Internasional tidak dapat dilakukan.

¹⁰ Krista E. Weigand, "The South Korean – Japanese Security Relationship and the Dokdo/Takeshima Islets Dispute", *The Pacific Review*, 2015, vol 28, no 3, hal 350

Aksi terbaru yang dilakukan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan yaitu ketika Jepang memasukan pulau Dokdo kedalam Buku Putih Pertahanan (*defense white paper*) milik mereka.¹¹ Didalam Buku Putih tersebut Jepang menggambarkan pulau Dokdo sebagai wilayah yang belum terselesaikan permasalahannya. Hal ini membuat Direktur Jenderal untuk Asia dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kim Jung-Han memanggil pejabat senior di Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan, Hirohisa Soma untuk mendesak Jepang agar menarik klaim terhadap pulau Dokdo.¹²

Dengan demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Jepang dalam merebut pulau Dokdo dari Korea Selatan menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian kali ini. Bisa dilihat adanya kepentingan dari pihak Jepang dalam memperebutkan wilayah tersebut, karena sebelumnya wilayah tersebut telah menjadi wilayah Korea Selatan, namun Jepang kemudian mengklaim kembali wilayah tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian kali ini, peneliti akan berusaha untuk menjelaskan apa kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan.



1.2 Rumusan Masalah

Perang klaim yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan menjadi awal dari mulainya sengketa pulau Dokdo ini. Jepang yang awalnya telah mengembalikan wilayah Korea Selatan pasca Perang Dunia II, secara tiba-tiba menyatakan bahwa

¹¹ Anna Suci Perwitasari, “Jepang Kembali Klaim Pulau Dokdo, Korea Selatan Berang”, 2020, <https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-kembali-klaim-pulau-dokdo-korea-selatan-berang> (diakses 23 februari 2021)

¹² Anna Suci Perwitasari, 2020, hal 1

pulau Dokdo tidak termasuk kedalam wilayah yang harus dikembalikan ke Korea Selatan, karena Jepang menganggap bahwa pulau tersebut merupakan pulau yang tidak ada pemiliknya (*terra nullius*) dan bukan menjadi bagian dari Korea Selatan. Jepang lalu melakukan beberapa protes kepada Korea Selatan yang terjadi selama rentang tahun 1950 hingga 1990-an. Protes diplomatik terbesar yang dilakukan pihak Jepang kepada Korea Selatan yaitu ketika mereka membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, namun Korea Selatan menolak pengajuan kasus tersebut karena Korea Selatan menganggap pulau tersebut memang milik Korea Selatan dan tidak ada yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Korea Selatan lebih memilih jalur diplomasi antar dua negara dalam menyelesaikan kasus sengketa pulau Dokdo karena Korea Selatan tidak mau menanggung resiko kehilangan pulau Dokdo apabila mereka kalah dalam Mahkamah Internasional. Dengan Jepang membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional terlihat bagaimana Jepang dengan serius ingin mengklaim pulau Dokdo tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, peneliti kemudian menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Apa kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam konteks *kepentingan nasional* serta mengetahui bagaimana kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

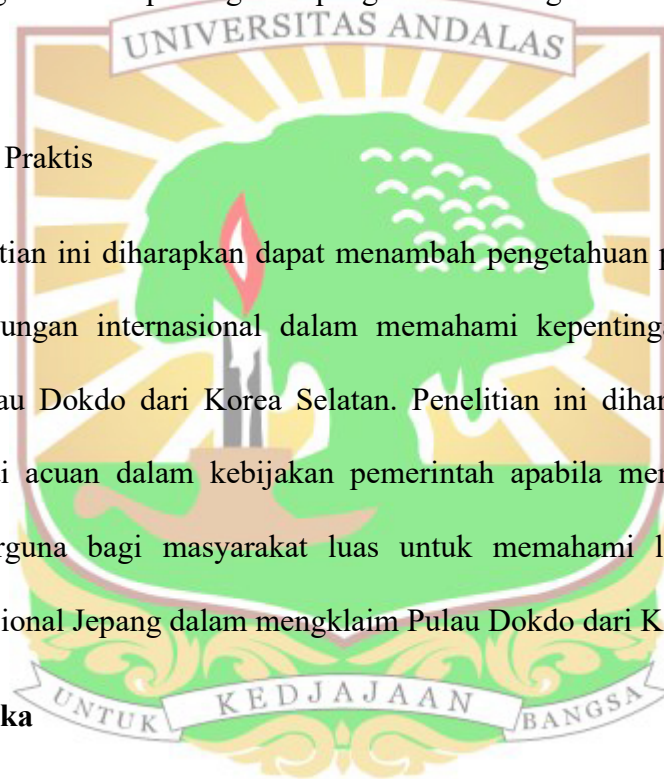
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terutama mahasiswa hubungan internasional dalam memahami kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai acuan dalam kebijakan pemerintah apabila menghadapi masalah serupa dan berguna bagi masyarakat luas untuk memahami lebih baik terkait kepentingan nasional Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya akan menjadi tolak ukur dan landasan bagi peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian.

Pertama yaitu tulisan dari Sung-Jae Choi yang berjudul “*The Politics of the Dokdo Issue*”. Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh Pulau Dokdo



terhadap politik dalam negeri Jepang dan Korea Selatan. Menurut Sung-Jae Choi sengketa yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan dalam perebutan Pulau Dokdo memberikan pengaruh terhadap politik dalam negeri kedua negara. Contohnya pada tahun 1996 ketika terjadi saling klaim terhadap Pulau Dokdo, para elit kedua negara mencoba memanfaatkan kasus ini untuk keuntungan mereka dalam pemilu.¹³

Masyarakat kedua negara sangat sensitive terhadap isu Pulau Dokdo. Pada rentang tahun 1996-2004, setiap ada oknum yang mengklaim Pulau Dokdo, baik itu dari pihak Jepang ataupun Korea Selatan, akan memunculkan ledakan nasionalisme dikalangan masyarakat kedua negara. Tulisan ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana isu pulau Dokdo tersebut sangat sensitif bagi masyarakat kedua negara dan juga membantu penulis dalam mendapatkan data mengenai seberapa berpengaruhnya isu ini bagi kedua negara. Dalam tulisan Sung Jae Choi sendiri, ia menjelaskan bagaimana pulau Dokdo berperan dalam politik dalam negeri kedua negara, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan tentang apa kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

Kedua, merupakan sebuah tulisan dari Alexander Bukh yang berjudul “*Shimane Prefecture, Tokyo and the territorial dispute over Dokdo/Takeshima: regional and national identities in Japan*”. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Pulau Dokdo telah menjadi bentuk kedaulatan bagi Jepang dan menjadi ikon bagi Prefektur Shimane. Ketika terjadinya perang klaim terhadap Pulau Dokdo, Jepang awalnya lebih memilih untuk tidak terlalu membesarkan masalah ini dan lebih memilih menggunakan cara

¹³ Sung-Jae Choi, “The Politics of the Dokdo Issue”, *Journal of East Asian Studies*, Vol. 5, No. 3, hal 489-490

kampanye domestik untuk menyadarkan masyarakatnya terkait pentingnya pulau tersebut.¹⁴

Pelafalan “*Takeshima Day*” atau Hari Takeshima adalah salah satu bentuk manifestasi terhadap kampanye domestik yang dilakukan oleh Jepang dan menjadi dorongan untuk menaikan rasa nasionalisme masyarakatnya. Pelafalan tersebut juga secara langsung menunjukan hubungan internal antara Shimane dengan ibukota Jepang yaitu Tokyo yang telah dibangun sejak lama dan berjalan dengan sangat baik. Tulisan ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana hubungan antara pulau Dokdo yang dimasukan kedalam Prefektur Shimane oleh Jepang dengan Tokyo sebagai ibukota Jepang. Dalam tulisan Alexander Bukh ini, ia menjelaskan bagaimana posisi pulau Dokdo yang telah menjadi ikon bagi Prefektur Shimane dan menjadi identitas dari kota yang berasal dari Jepang tersebut, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

Ketiga, yaitu sebuah tulisan oleh Chien-Peng Chung & Jeongwon Bourdais Park, yang berjudul “*Sub- and Trans- National Actors in South Korea's Island Disputes: The Cases of Dokdo and Iōdo*”. Jurnal ini memberikan analisis politik pada dua sengketa teritorial yang Korea Selatan hadapi dengan Jepang, terkait Pulau Dokdo dan dengan China atas Iodo/Suyan Rocks, serta implikasinya bagi kawasan Asia Timur Laut, dengan berfokus pada peran sub aktor negara dan Amerika Serikat sebagai aktor transnasional pihak ketiga. Korea Selatan menganggap klaim teritorial

¹⁴ Alexander Bukh, “Shimane Prefecture, Tokyo and the territorial dispute over Dokdo/Takeshima: regional and national identities in Japan”, *The Pacific Review*, 2015, Vol 28, No 1, Hal 64-65

dari Jepang dan China sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatannya dan menimbulkan demonstrasi yang besar terkait kepemilikan pulau-pulau tersebut, karena mereka sudah melakukan kontrol efektif atas wilayah yang jadi sengketa tersebut. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah Korea Selatan dalam penyelesaian masalah terkait *illegal fishing* yang terjadi di Pulau Dokdo oleh nelayan Jepang dan kapal-kapal China di Pulau Iodo.¹⁵ Tulisan ini berkontribusi dalam menjelaskan bagaimana Korea Selatan menghadapi sengketa teritorial secara politik. Dalam tulisan Chien-Peng Chung ini ia menjelaskan bagaimana analisis politik yang dihadapi antara Korea Selatan dengan Jepang terkait sengketa teritorial, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan tentang apa kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

Tulisan yang keempat oleh Jon M. Van Dyke yang berjudul “*Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and It’s Maritime Boundary*”. Tulisan ini membahas terkait dengan analisis masalah hukum yang saat ini terjadi di Pulau Dokdo, dan satuan hukum yang telah diterapkan oleh pengadilan internasional terhadap perselisihan lain mengenai wilayah terpencil dan tidak berpenghuni, dan prinsip-prinsip yang mengatur penetapan batas laut yang relevan dengan ruang laut di sekitar Pulau Dokdo. Keputusan yang berlaku dari Mahkamah Internasional dan pengadilan-pengadilan lain diperiksa secara rinci. Di antara topik yang dibahas adalah metode memperoleh kedaulatan atas wilayah, relevansi kedekatan dengan klaim tersebut, persyaratan protes yang efektif, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dilakukan

¹⁵ Chien-Peng Chung & Jeongwon Bourdais Park, “Sub- and Trans- National Actors in South Korea’s Island Disputes: The Cases of Dokdo and Iōdo”, *Asian Affairs: An American Review*, 2017, 44:1, Hal 9-10, DOI: [10.1080/00927678.2017.1283629](https://doi.org/10.1080/00927678.2017.1283629)

didaerah yang sedang bersengketa.¹⁶ Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di pulau Dokdo yang nantinya akan sangat membantu peneliti dalam penelitian kali ini. Dalam tulisan Jon M Van Dyke ini, ia menjelaskan bagaimana pandangan hukum terkait permasalahan pulau Dokdo dan bagaimana satuan hukum yang cocok dalam menyelesaikan sengketa pulau Dokdo, sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan tentang apa kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

Dan yang kelima merupakan sebuah tulisan oleh Krista E. Wiegand yang berjudul “*The South Korean Japanese Security Relationship and the Dokdo/Takeshima Islets Dispute*”. Tulisan ini menjelaskan bagaimana hubungan dan dampak terkait masalah sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Contohnya ketika tahun 2012, Korea Selatan dan Jepang hampir menandatangani perjanjian mengenai keamanan bilateral yang akan membantu untuk mengatasi ancaman keamanan bersama, terkait kebangkitan Cina dan pengujian rudal Korea Utara dan pengembangan nuklir. Namun pemerintah Korea Selatan menghentikan penandatanganan perjanjian tersebut dengan alasan adanya masalah domestik. Mengapa pemerintah Korea Selatan tidak mampu atau tidak mau untuk melakukan perjanjian keamanan dengan Jepang? Dalam penelitian ini Wiegand berpendapat, pertama apakah perjanjian keamanan ini diperlukan oleh kedua belah pihak, dan

¹⁶ Jon M. Van Dyke, “Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary”, *Ocean Development & International Law*, 2007, Vol 38, Hal 157–158,

kedua, peran Pulau Dokdo dalam pengambilan keputusan terkait dengan perjanjian keamanan antar kedua negara.¹⁷

Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan gambaran bagaimana hubungan keamanan antara Jepang dan Korea Selatan yang diakibatkan oleh konflik ini dan diharapkan nantinya akan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam tulisan dari Krista E. Weigand ini, ia menjelaskan bagaimana hubungan dan dampak yang ditimbulkan dari sengketa pulau Dokdo ini bagi Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kepentingan Nasional

Hubungan yang terjadi antarnegara dalam sistem internasional umumnya dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang menjadi dasar bagi negara untuk bertindak. Kepentingan tersebut pada dasarnya dapat berorientasi pada kepentingan yang bersifat *high politic* ataupun *low politic*. Tidak hanya itu, kepentingan nasional dilihat sebagai bagian penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional yang akan diperjuangkan atau dicapai oleh suatu negara dijadikan sebagai pertimbangan utama bagaimana negara akan bertindak dan bentuk kebijakan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh suatu negara. Menurut Jack. C Piano dan Roy Olton, kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan mendasar serta

¹⁷ Krista E. Weigand, "The South Korean Japanese security relationship and the Dokdo/Takeshima islets dispute", *The Pacific Review*, 2015, Vol. 28, No. 3, Hal 347-348, <http://dx.doi.org/10.1080/09512748.2015.1011209>

faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara.¹⁸ Unsur yang dimaksud meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Kepentingan nasional suatu negara tentunya berbeda dengan negara yang lainnya, karena kapasitas yang dimiliki oleh setiap negara juga berbeda yang akhirnya mempengaruhi tujuan dan kepentingan yang ingin dicapainya. Menurut Joseph Frankel, kepentingan nasional berhubungan erat dengan tujuan kebijakan luar negeri suatu negara.¹⁹ Kepentingan nasional turut menggambarkan bagaimana perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain. Morgenthau melihat kepentingan nasional sebagai bentuk upaya negara dalam mengejar kekuasaan untuk mempertahankan pengendalian atas negara lain.²⁰ Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam mempertahankan integritas teritorial, keberlangsungan ekonomi, serta memelihara norma-norma etnik, dan identitas kultural. Dalam mencapai kepentingannya, negara menjalankan berbagai strategi, salah satunya dapat dilihat melalui kerja sama, baik secara bilateral maupun multilateral.

¹⁸ Jack C. Piano and Roy Otton, *The International Dictionary*, edisi ketiga, (England: Clio Press Ltd, 1982): 7

¹⁹ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, (Palgrave Macmillan, 2005):

²⁰ Hans J. Morgenthau, "Another Great Debate: The National Interest of the United States," *The American Political Science Review*, (Washington, 1952): 973

Selain itu, kepentingan nasional juga dilihat sebagai kebutuhan dasar negara ketika berhubungan dengan negara lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Donald E. Nuechterlein yang menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat melalui hubungannya dalam ruang lingkup eksternal.²¹ Nuechterlein mengategorikan kepentingan nasional menjadi beberapa aspek, sebagai berikut:²²

1. Kepentingan Pertahanan

Kepentingan pertahanan meliputi aspek perlindungan terhadap potensi ancaman yang dari pihak eksternal. Tujuan utama yang dimaksud meliputi perlindungan terhadap negara beserta warga negaranya dari ancaman fisik maupun ancaman non-fisik dari negara lain. Ancaman yang dimaksud berpotensi menciptakan ketidakstabilan bagi pemerintahan negara tersebut, sehingga negara perlu mengambil suatu kebijakan.

2. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi dijelaskan sebagai salah satu kepentingan prioritas ketika negara mengambil suatu tindakan atau kebijakan. Kepentingan ekonomi dicapai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam hubungannya dengan negara dan aktor internasional lainnya. Aspek yang terlibat dalam kepentingan ekonomi ini, meliputi aspek sumber daya, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya.

²¹ Donald E. Nuechterlein, "National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Approach for Analysis and Decision Making", *British Journal of International Studies* 2, no.3, (1976): 248

²² Donald E. Nuechterlein, (1976):248

3. Kepentingan Tatanan Dunia

Kepentingan ini berorientasi dalam hubungan antar negara dengan negara lainnya dalam sistem internasional. Tujuannya adalah untuk pemeliharaan terhadap stabilitas politik dan ekonomi yang akan berpengaruh dalam lingkup atau tatanan internasional terhadap negara tersebut. Dengan terjaganya sistem politik dan ekonomi internasional maka masyarakat akan merasa aman dan perdagangannya dapat beroperasi secara damai di luar perbatasan negaranya.

4. Kepentingan Ideologi

Kepentingan ideologi merupakan salah satu tujuan yang berusaha dicapai oleh negara berdasarkan aspek nilai-nilai yang dipercaya atau dianut oleh suatu negara. Tindakan atau kebijakan yang diambil oleh negara berdasarkan kepentingan ideologi dilihat dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah untuk memelihara atau mempertahankan nilai yang dianggap baik dan telah diterapkan oleh negara tersebut.

Donald E. Nuechterlein juga menyatakan terdapat empat indikator yang menentukan intensitas kepentingan tersebut yaitu:²³

- a. Isu kelangsungan hidup (Survival Issues): memiliki indikator yaitu ancaman bersifat langsung dan nyata dan diperikarakan mampu menghancurkan negara lain. Hal ini berupa serangan militer ke wilayah negara atau terdapat ancaman penyerangan dari musuh baik dari darat, laut, udara. Isu kelangsungan hidup merupakan level indikator tertinggi dimana pada skala ini hanya kepentingan

²³ Donald E Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making", British Journal of International Studies, Vol 2, (1976) hal 249-250

pertahanan saja yang dapat mencapai skala ini berdasarkan definisi yang ada. Adapun cara membedakan apakah suatu ancaman merupakan survival issues adalah ancaman tersebut merupakan ancaman langsung dan dipercaya dapat memberikan kerusakan fisik terhadap suatu negara berskala besar oleh suatu negara bangsa di negara lain.

- b. Isu vital (Vital Issues): memiliki indikator yaitu berupa mengancam politik dan ekonomi suatu negara namun ancaman tersebut masih belum terjadi. Hal ini hampir sama seperti survival issues namun vital issues suatu negara masih memiliki waktu untuk mencari bantuan kepada negara lain dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa saja suatu negara dapat menuntut menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi tindakan asing yang dapat merugikan negara tersebut. Adapun perbedaan dari vital issues dengan survival issues adalah dimana survival issues hanya melibatkan kepentingan pertahanan sedangkan vital issues dapat melibatkan kepentingan ekonomi, tatanan dunia, dan ideologi.
- c. Isu utama (Major Issues): ketika permasalahan ekonomi, politik dan ideologi dipengaruhi secara negatif oleh peristiwa dan tren di lingkungan internasional dan kemudian membutuhkan tindakan yang bersifat mencegah agar tidak menjadi ancaman yang serius. Pada tahap ini, negara mencoba untuk memastikan ancaman yang ada tidak muncul menjadi ancaman yang lebih serius dan dapat mengancam kepentingan dan keamanan negara (isu vital). Kebanyakan kepentingan ekonomi dan ideologi merupakan major issues dan

bukan vital issues namun berbeda dengan kepentingan tatanan dunia karena isu dapat mempengaruhi perasaan suatu negara terhadap keamanannya.

- d. Isu periperal (Peripheral Issues): Hal ini diindikasikan ketika kesejahteraan negara tidak dipengaruhi oleh peristiwa atau tren di luar negeri, tetapi kepentingan pribadi warga negara dan perusahaan yang beroperasi terancam. Setiap negara-bangsa menetapkan prioritasnya masing-masing terhadap seberapa besar nilai perusahaan komersial yang beroperasi di luar negeri. Untuk beberapa negara, ini merupakan masalah utama kepentingan nasional, tetapi bagi negara lain itu hanya kepentingan yang bersifat periperal.

Beberapa aspek di atas menjelaskan tentang berbagai pertimbangan negara dalam mengambil suatu tindakan ataupun kebijakan yang diperhatikan dari berbagai sisi. Tidak hanya itu, kepentingan nasional yang berusaha dicapai oleh negara pun memiliki tingkatan atau prioritas utamanya. Berdasarkan penjelasan pada kerangka konseptual Kepentingan Nasional diatas, penulis akan menganalisis kepentingan Jepang dalam mengklaim Pulau Dokdo dari Korea Selatan berdasarkan berbagai faktor yang telah dijelaskan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat

dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersumber dari data-data yang dikumpulkan melalui berbagai media.

Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan secara deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini diangkat dengan lebih rinci melalui penjelasan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi atau negara.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti memberikan batasan terhadap penelitian ini berdasarkan waktu, yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 untuk menganalisis kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan. Pada tahun 2012 menjadi tahun dimana Jepang dengan gencarnya melakukan protes kepada Korea Selatan terkait pulau Dokdo hingga mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Tahun 2020 menjadi batas penelitian karena pada tahun tersebut Jepang kembali mengklaim pulau Dokdo dan memasukan pulau Dokdo kedalam Buku Putih Pertahanan milik Jepang, sehingga membuat Korea Selatan melancarkan protes atas tindakan Jepang tersebut.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan dianalisis.²⁴ Sementara itu, unit eksplanasi merupakan unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisis. Kedua variabel ini saling mempengaruhi,

²⁴ Mohtar Ma' oed, "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi", LP3ES, 1990, hal. 108.

atau secara umum variabel independen dikenal sebagai variabel penyebab, dan variabel dependen dikenal sebagai variabel akibat.²⁵ Selanjutnya, level analisis atau tingkat analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang dijelaskan. Level analisis akan membantu peneliti dalam menjelaskan area penelitian yang akan dijelaskan.²⁶ Dalam penelitian ini yang akan menjadi unit analisis adalah kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo. Unit eksplanasi dalam penelitian kali ini adalah klaim yang dilakukan Jepang terhadap pulau Dokdo. Sementara itu, level analisis atau tingkat analisis dalam penelitian kali ini yaitu berada pada level negara. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan apa kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *library research* atau studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Peneliti kemudian mengumpulkan fakta dan data-data tertulis dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber tersebut berupa buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah dan organisasi internasional, dan situs-situs internet yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

Data-data yang dikumpulkan adalah terkait permasalahan yang terjadi di pulau Dokdo yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. Penulis menggunakan data-data terdahulu yang terdapat pada tulisan dan artikel jurnal terkait untuk menjadi acuan

²⁵ Mohtar Ma' oed, hal. 109

²⁶ Mohtar Ma' oed, hal. 35

dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan data-data dari website Departemen Luar Negeri Korea Selatan untuk mendapatkan data resmi mengenai letak dan posisi pulau Dokdo.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti akan melakukan analisis data melalui beberapa tahap. Tahap pertama, peneliti akan mengumpulkan data-data dan juga fakta untuk mendukung pertanyaan penelitian nanti. Data yang diperoleh dari berbagai sumber sekunder kemudian akan direduksi, dijabarkan pada unit-unit dan kemudian disusun kedalam pola dan memilih yang mana yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang ada sehingga didapatkan kesimpulan dan verifikasi.

Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi, data-data yang terkait kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo nantinya akan diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dituliskan oleh peneliti. Dari data yang telah didapatkan, penulis akan menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan terkait pulau Dokdo, lalu data tersebut akan diinterpretasikan dengan konsep Kepentingan Nasional, yang nantinya digunakan untuk melihat apa kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dan akan diterapkan dengan indikator-indikator yang ada dalam konsep Kepentingan Nasional.

Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat apa kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan. Peneliti pada akhirnya dapat menganalisis dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dituliskan oleh peneliti sebagai hasil dari penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dimuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka sebagai bahan rujukan dan pembandingan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metode penelitian, unit analisa dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

Bab II Pulau Dokdo Bagi Korea Selatan dan Jepang

Dalam bab ini nantinya peneliti akan menjelaskan bagaimana sejarah kepemilikan pulau Dokdo menurut pandangan Korea Selatan dan menurut pandangan Jepang.

Bab III Klaim Jepang Terhadap Pulau Dokdo dari Korea Selatan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang awal mula sengketa pulau Dokdo ini terjadi hingga konflik terbaru mengenai sengketa pulau Dokdo.

Bab IV Analisis Kepentingan Jepang dalam Mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan

Dalam bab ini penulis akan menganalisis apa kepentingan Jepang dalam mengklaim pulau Dokdo dari Korea Selatan.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan terkait topik penelitian serta saran dari peneliti sebagai hasil dari penelitian.

